
Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali)

Sri Mulyani

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar, Indonesia
email: srimulyani@untidar.ac.id

Firda Mardhatillah Putri

Ilmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
email: firdamardhatillah2306@gmail.com

Bhimo Widyo Andoko

Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
email: ses.ildikti851@gmail.com

Faisal Akbar

Ilmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
email: aqil.teguh.psc19@mail.umy.ac.id

Savira Novalia

Ilmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
email: novaliasavira@gmail.com

Dikirim: 19-10-2020; Direvisi: 30-12-2020; Diterima; 31-12-2020

ABSTRACT

This study had an aim to saw how the impact of infrastructure development on food resilience conditions in Indonesia, focusing on Bali Province. The result of infrastructure development was one of the main factors in realizing the presence of Food Resilience in Indonesia, so the government needed to built supporting infrastructure intended for people who had conditions far from food resilience and good infrastructure.

This research used a descriptive method, with taking data from literatur, document, journal, and internet.

This study found that the impact of infrastructure development was closely related to the condition of a region's resilience; Bali Province was one of the provinces that had a high food resilience index score, even in the national food resilience index ranking, Bali Province had an index score of 85.15 making Bali Province as the first place in food resilience when compared to other provinces. The food resilience conditions of regencies/cities in Bali Province also showed high index scores; this could be seen in the last two years the position of Denpasar

City, Tabanan Regency, Gianyar Regency, and Badung Regency to become cities and regencies that occupied the highest place in the national food resilience index score.

Keywords: Development Impact; Infrastructure; Food Resilience; Bali Province.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap kondisi ketahanan pangan di Indonesia yang berfokus di Provinsi Bali. Perkembangan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama untuk mewujudkan hadirnya Ketahanan Pangan di Indonesia, sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur penunjang yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kondisi jauh dari angka ketahanan pangan dan infrastruktur yang baik.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mengambil data dari kepustakaan, dokumen, jurnal, dan internet

Penelitian ini menemukan bahwa dampak pembangunan infrastruktur menjadi sangat berkaitan dengan kondisi ketahanan suatu wilayah, Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang memiliki skor indeks ketahanan pangan yang tinggi, bahkan dalam ranking indeks ketahanan pangan nasional Provinsi Bali memiliki skor indeks 85,15 menjadikan Provinsi Bali sebagai urutan pertama dalam ketahanan pangan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Kondisi ketahanan pangan kabupaten/kota di Provinsi Bali juga menunjukkan skor indeks yang tinggi, hal ini dapat dilihat dalam 2 tahun terakhir posisi Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung menjadi kota dan kabupaten yang menduduki posisi teratas dalam skor indeks ketahanan pangan nasional.

Kata Kunci: Dampak Pembangunan; Infrastruktur; Ketahanan Pangan; Provinsi Bali

PENGANTAR

Peran pemerintah sangat penting dalam rangka menghadirkan pembangunan perekonomian di Indonesia, jika dilihat dari keterpurukan situasi ekonomi yang menimpa Negara Indonesia pada tahun 1997 telah memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh akar pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Afriyenis, 2016). Seiring berjalannya pemerintahan orde baru, kondisi pembangunan pada bidang ekonomi nasional pada masa awalnya dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan dan mendapatkan banyak pujian dari berbagai kalangan namun kemudian secara tiba-tiba di tahun-tahun selanjutnya mengalami kemunduran yang cukup drastis. Kemunduran yang terjadi ini kemudian membawa pembangunan perekonomian Negara Indonesia ke masalah yang serius, dampak yang terjadi contohnya ialah terjadinya turbulensi nilai tukar rupiah, tingkat bunga yang tinggi, dan

krisis pinjaman luar negeri, sehingga pasca reformasi yang terjadi di akhir 90'an Negara Indonesia membutuhkan hadirnya akselerasi pembangunan agar terwujud ekonomi negara yang stabil,imbang, merata dan sesuai dengan keadilan untuk seluruh rakyat di Indonesia (Afriyenis, 2016)

Menurut Muller dkk., (2015) infrastruktur dicirikan sebagai prasarana fisik yang menyediakan sarana transportasi sosial dan ekonomi, irigasi, drainase, bangunan, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Infrastruktur seringkali dikaitkan dengan sistem lingkungan dalam sistem sosial dan ekonomi, penyediaan infrastruktur berpengaruh pada sistem sosial dan ekonomi kota saat ini, sehingga infrastruktur harus diakui sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 menjelaskan bahwa

pangan adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari sumber hayati hasil pertanian olahan, kehutanan, perkebunan, perikanan, air, peternakan, baik yang sudah diolah maupun yang tidak diolah yang dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan atau minuman, termasuk bahan pangan tambahan, bahan baku pangan yang digunakan pada proses pengolahan makanan atau minuman. Dengan hadirnya ketahanan pangan ditujukan agar penduduk mampu menghadirkan kemandirian pangan dalam menjalani kehidupan, definisi dari kemandirian pangan didalam UU RI No. 18 2012 ialah kapasitas produksi pangan dalam negeri yang didukung oleh Kelembagaan Ketahanan Pangan yang bekerja untuk menjamin terpenuhinya kecukupan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga baik secara kualitas, kuantitas, perlindungan, maupun dengan keterjangkauan harga yang sudah didukung oleh produksi pangan yang sangat beragam berdasarkan dengan kearifan dan keragaman lokal.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia harus sejalan dengan Undang-undang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yaitu dengan terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Yogyakarta, 2019). Guna menciptakan hal tersebut perlu sebuah upaya yang ditransformasikan ke dalam delapan misi pembangunan nasional, di antara misi pembangunan nasional tersebut salah satunya bertujuan untuk menghadirkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan agar dapat menumbuhkan pembangunan daerah, meminimalisir adanya bentuk kesenjangan sosial, berpihak untuk masyarakat, wilayah dan kelompok yang masih lemah, menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan dan

pengangguran, menyediakan fasilitas yang sama dan memadai untuk masyarakat kepada pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi, kemudian misi terakhir ialah menghapus diskriminasi dari berbagai sisi termasuk diskriminasi terhadap gender (N, dkk., 2018).

Beberapa literatur penelitian terdahulu telah menyebutkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan di Indonesia salah satunya ialah terjadinya perbedaan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang ada. Sebagai kunci dari peningkatan ekonomi, pemenuhan infrastruktur yang layak berperan penting dalam pengembangan suatu wilayah (Sukwika, 2018). Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam isu ketahanan pangan dan kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur. Indonesia memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari banyak pulau sehingga pemerintah harus mengupayakan pemerataan dalam distribusi pangan, selain itu wilayah Indonesia juga memiliki kondisi wilayah yang berbeda-beda di setiap kepulauannya (Schaar, 2017). Oleh karenanyalah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata pemerintah Indonesia menyelenggarakan pembangunan di bidang pangan dengan bekerjasama bersama lembaga serta organisasi pangan dunia, menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional (Suryana, 2014).

Problem terkait kondisi pangan saat ini terjadi dikarenakan pembangunan infrastruktur yang masih dirasakan kurang guna menunjang aksesibilitas ketahanan pangan (Rachman, 2016). Indonesia sendiri memiliki banyak daerah otonomi tingkat bawah yang disebut desa/kampung, sebagian besar desa/kampung di wilayah Indonesia merupakan basis daripada pertanian (Jenderal,

dkk., 2019). Dalam aspek ketahanan ekonomi, pedesaan saat ini masih belum mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga masih banyak bergantung kepada produk perekonomian primer yang berdampak pada dimasukkannya desa oleh masyarakat kota dalam pemenuhan kebutuhan hariannya (Santoso, 2016). Hal tersebut menimbulkan beberapa sebab kemiskinan yang sangat signifikan karena penyebaran pangan dan ekonomi tidak merata, hal ini dikarenakan pembangunan di setiap wilayah Indonesia dihadapkan dengan persoalan pembangunan yang fundamental dan belum terealisasi (Islamiah, 2015).

Pada tahun 2015 Millenium Development Goals (MDGs) menyepakati dan menyetujui bahwa setiap negara harus berperan dalam menurunkan kelaparan dan kemiskinan yang terjadi pada tahun 1990 (Fukuda-Parr, 2016). Dengan adanya hal tersebut Komite Indonesia berdasarkan dengan UU No 7 tahun 1996 melakukan pengamatan pembangunan pangan terhadap kebutuhan dasar masyarakat bersama pemerintah (Afiat, 2015). Untuk memenuhi ketahanan pangan diperlukan pembangunan kapasitas manusia di daerah tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pengembangan agrarian (Husna dan Albsayah, 2012).

Pembangunan ekonomi mensyaratkan suatu tahapan pembangunan yang berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita, dibarengi dengan memperkirakan pertambahan jumlah penduduk dan disertai dengan adanya perubahan fundamental dalam format ekonomi serta pemerataan pendapatan bagi seluruh penduduk negara tersebut. Salah satu tantangan utama dari

pembangunan di Negara Indonesia ini yaitu menangani persoalan ketimpangan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia serta makhluk hidup lainnya. ketahanan pangan merupakan suatu kebutuhan yang sangat kompleks serta berkaitan secara langsung dengan aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek politik (Usmaliadanti, 2011).

Problem terkait kondisi pangan hari ini masih menjadi perhatian utama dunia, permasalahan kerawanan pangan tidak hanya terjadi di negara-negara tertinggal, dan negara-negara berkembang, namun juga negara-negara yang saat ini sudah memiliki pertumbuhan yang pesat dalam segala bidang kehidupan juga mengalaminya (Conceição, dkk., 2016; Hapsari dan Rudiarto, 2017; Yeoh, dkk., 2014). Pada dasarnya ketahanan pangan ingin menghadirkan ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan, serta keterjangkauan pangan (Soekirman, 2000; Wado, dkk., 2019).

Konsep ketahanan pangan memiliki beberapa aspek. Terdapat 8 aspek perihal konsep ketahanan pangan menurut Pramono (2014), sebagai berikut.

Pertama, kebutuhan rumah tangga. Hal ini menyangkut dengan ketahanan pangan nasional, individu dan komunitas semua makhluk hidup yang membutuhkan pangan baik dari wilayah manapun, tetapi kebutuhan pokok setiap rumah tangga memang berbeda, untuk wilayah Indonesia barat mengkonsumsi beras, dan Indonesia timur mengkonsumsi sagu.

Kedua, peran pemerintah. Dalam melibatkan ketahanan pangan baik dari masyarakat kecil maupun masyarakat dominan, pemerintah harus menjamin hak pangan dan tidak membedakan pangan untuk wilayah timur, barat, dan tengah.

Ketiga, cakupan aspek ketahanan pangan. Ketersediaan mutu paangan (*food quality*) dan jumlah pangan (*food sufficien*).

Keempat, mutu pangan. Ini penting karena masalah yang sering terjadi di Indonesia pembagian sembako selalu tidak diperhatikan seperti raskin dengan kualitas dengan mutu yang sangat rendah.

Kelima, produksi pangan. Setiap daerah juga harus diperhatikan, mulai dari pengelolaan, produksi, pengemasan, serta distribusi.

Keenam, *food safety*. *Food safety* merupakan hal yang perlu diperhatikan jika makanan tercemar oleh bahan kimia dan dapat menghambat ketahanan pangan.

Ketujuh, pemerataan, yaitu mengupayakan pemerataan makan terutama dalam kasus diskriminasi ketahanan pangan Indonesia timur dan barat, agar hal ini dievaluasi kembali oleh pemerintah.

Kedelapan, kesamaan derajat. Kesamaan derajat dalam persebaran pangan, keterjangkauan pangan, dan hak masyarakat memenuhi kebutuhan pangan

Dalam mewujudkan ketahanan negara diperlukan ketahanan dalam kestabilan ekonomi, pemerintah, masyarakat, ketersediaan akses distribusi, serta ketahanan pangan yang diwujudkan dengan penjaminan ketersediaan dan kemampuan akses setiap rumah tangga untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Arluis, dkk., 2017; Janti, 2016). Pada tahun 2011 Konferensi Boon menyelenggarakan sebuah diskusi terkait permasalahan ketahanan pangan dengan akademisi dari Singapura. Dalam pertemuan tersebut kemudian merumuskan kesepakatan bersama terkait konsep ketahanan pangan (Rivani, 2012). Konsep ketahanan pangan

yang dihasilkan mensyaratkan pemerintah untuk membuat sebuah inovasi kebijakan publik dalam menciptakan suatu pelayanan publik terkait ketahanan pangan yang ada di Indonesia (Wulandari, dkk., 2019).

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur penghubung antar wilayah serta infrastruktur penunjang pengembangan agraria di wilayah tersebut, dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses ketersediaan pangan dan meningkatkan indeks keterjangkauan terhadap pangan yang tersedia.

Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap kondisi ketahanan pangan yang ada di Provinsi Bali. Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan peneliti akan menggunakan beberapa rumusan masalah yakni (1). Mengetahui sejauh mana kondisi ketahanan pangan di Provinsi Bali, (2). Sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur dalam mempengaruhi kondisi ketahanan pangan yang ada di Provinsi Bali, serta Kabupaten/ Kota yang ada di dalamnya. Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bersifat deskriptif analisis (Janti, 2016; Wati, dkk., 2019). Kualitatif deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan memusatkan perhatian kepada sebuah kasus yang sedang terjadi melalui pengumpulan data yang kemudian data tersebut disusun serta dianalisis dengan pendekatan kualitatif (Achmad, dkk., 2019; Moleong, 2007; Nazir, 1999).

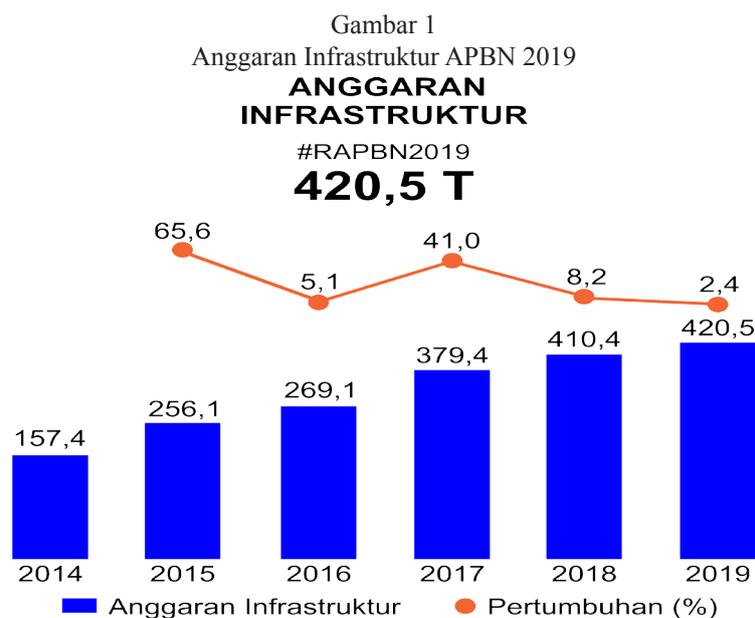
PEMBAHASAN

Menghadirkan pembangunan ekonomi merupakan suatu kewajiban setiap negara yang harus dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakatnya (Pratama dan Purnomo, 2020). Dengan adanya pembangunan ekonomi tersebut maka diperlukan adanya sumber daya ekonomi produktif di setiap negara yang mana sumber daya ekonomi tersebut mampu menjadi katalisator pembangunan. Pembangunan infrastruktur di negara Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam mempercepat laju pembangunan nasional (Asahdi, 2015). Dengan pembangunan infrastruktur ini ditargetkan dapat meningkatkan aksesibilitas yang dapat mengakomodasikan pergerakan barang dan jasa agar lebih efisien serta dapat memudahkan dalam mendistribusikan supply pangan keberbagai daerah (Putro, 2015) (Lihat gambar 1).

Gambar 1 tersebut menunjukkan alokasi anggaran infrastruktur tahun 2014 s.d 2019 selalu mengalami peningkatan dalam pengalokasian anggaran APBN, peningkatan

tersebut yang paling tinggi berada di tahun 2017, pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 41,0%, tetapi jika dibandingkan gambar pertumbuhannya tidak terlalu signifikan dengan yang terdapat di tahun 2015. Pengalokasian anggaran infrastruktur setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pengalokasian anggaran di ranah infrastruktur yang terus tumbuh dan ini pula menunjukkan bahwa arah pembangunan nasional dalam bidang infrastruktur harus mampu menjadi perhatian utama sebagai penunjang pembangunan dalam segala bidang yang merata disemua wilayah yang ada di Indonesia.

Keterkaitan antara infrastruktur dan ketahanan pangan sangat erat hubungannya, apabila infrastruktur sudah memadai maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat, hal ini dilihat dari akses masyarakat terhadap pangan yang dapat tercukupi (Erviyanto, 2017). Ketahanan pangan adalah hal yang paling pokok untuk keberlangsungan suatu negara. Indonesia dengan jumlah penduduk 268.074.600 jiwa atau setara 3.52 % penduduk



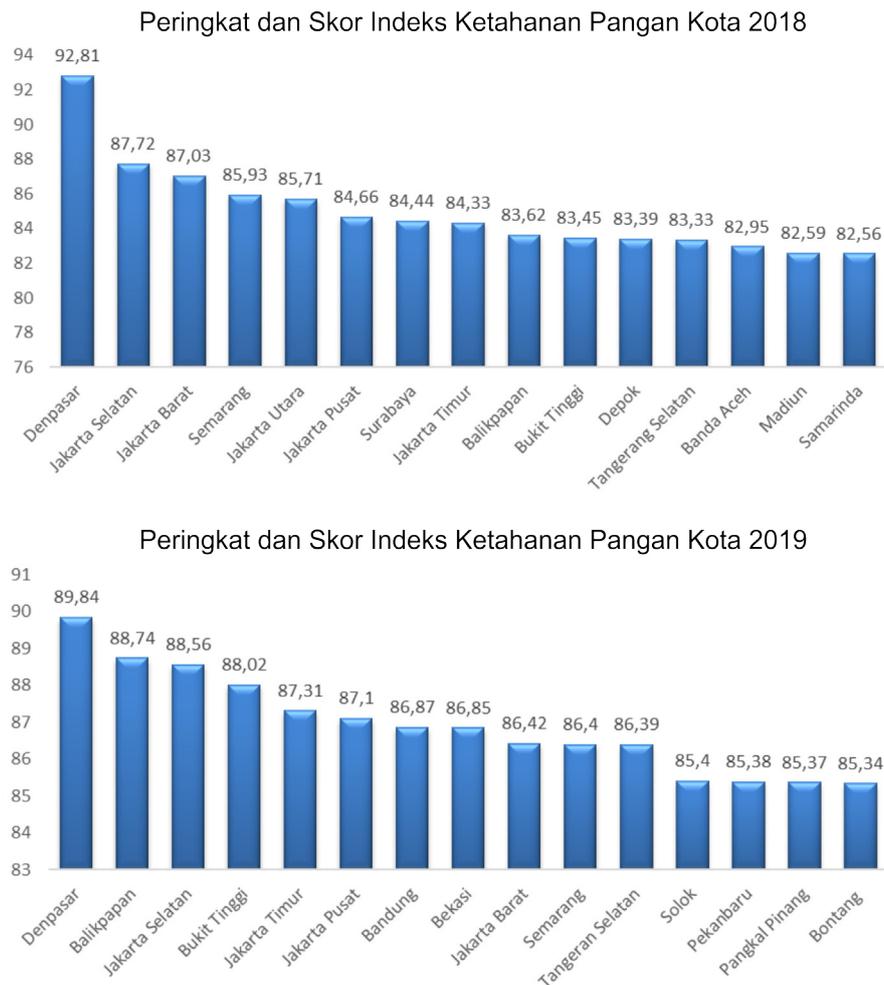
Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2017.

di dunia (Badan Ketahanan Pangan, 2017). Untuk itu dengan jumlah penduduk yang cukup banyak hal ini mengharuskan pemerintah untuk lebih serius dalam memperhatikan kondisi ketahanan pangan nasional (Erwandari, 2017) (Lihat gambar 2).

Gambar 2 tersebut menunjukkan 15 kota di Indonesia yang memiliki peringkat dan skor ketahanan pangan yang paling tinggi. Kota Denpasar menjadi kota yang paling tinggi dan stabil dalam skor ketahanan pangannya, jika gambar 2019 dibandingkan dengan gambar 2018 di Kota Denpasar terjadi penurunan beberapa poin namun masih

tetap menjadikan Kota Denpasar peringkat pertama dalam indeks ketahanan pangan kota 2019. Sementara itu Kota Balikpapan dan Kota Bukit Tinggi menjadi kota yang pada indeks ketahanan tahun 2019 mendapatkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari posisi peringkat Kota Balikpapan yang awalnya di posisi ke 9 (sembilan) merengsek naik ke posisi ke 2 (dua), begitu pula Kota Bukit Tinggi yang tadinya di posisi ke 10 (sepuluh) mengalami peningkatan hingga mampu mencapai posisi ke 4 pada tahun 2019. Peningkatan yang tidak signifikan justru dialami oleh Kota Jakarta Selatan dan

Gambar 2
Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 2018-2019



Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2018, 2020

Kota Semarang, hal ini menyebabkan Kota Jakarta Selatan turun ke posisi ke 3 (tiga) dan Kota Semarang ke posisi peringkat ke 10.

Selain pemahaman tentang 15 kota di Indonesia yang menempati peringkat tertinggi, data di dalam gambar 2 juga menunjukkan bahwa kota-kota yang memiliki kemampuan ketahanan pangan yang terjamin diwujudkan dengan dibarengi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan masif. Hal ini ditunjukkan dari tingkat pembangunan infrastruktur yang ada sudah tinggi dan dapat menghubungkan wilayah-wilayah yang ada, sehingga kehadiran infrastruktur yang baik dapat memobilisasi pembangunan pangan di daerah tersebut dapat terpenuhi dengan baik (Agustina, 2020; Fagi, 2014). Meningkatkan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu daerah tidak terlepas dari kehadiran infrastruktur yang memadai. Kota Denpasar menjadi salah satu kota yang memiliki pembangunan infrastruktur yang baik, sehingga dalam indeks ketahanan pangan kota dapat menduduki posisi yang tertinggi di antara kota-kota lainnya di Indonesia (Badan Ketahanan Pangan, 2018, 2020; Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2020) (Lihat gambar 3).

Berdasarkan gambar 3 tersebut, yang menjadi kabupaten dengan skor indeks ketahanan pangan tertinggi dapat dilihat di dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut ialah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten yang konsisten menunjukkan pertumbuhan dalam ketahanan pangannya. Dari tiga kabupaten yang menempati peringkat tertinggi semua kabupaten tersebut berada di dalam Provinsi Bali.

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki prospek pembangunan yang signifikan, khususnya dalam hal

infrastruktur. Posisi Bali sebagai salah satu tujuan destinasi wisata dunia membuat Provinsi Bali menjadi salah satu wilayah yang memiliki akses infrastruktur yang baik. Hal ini kemudian secara tidak langsung mendukung terjaminnya kualitas ketahanan pangan yang tinggi di wilayah Provinsi Bali, selain infrastruktur yang sudah memadai kondisi geografis wilayah Provinsi Bali pun mendukung upaya swasembada pangan. Dengan budaya agraria masyarakatnya yang cukup tinggi membuat Provinsi Bali dapat menjaga terjaminnya ketahanan pangan.

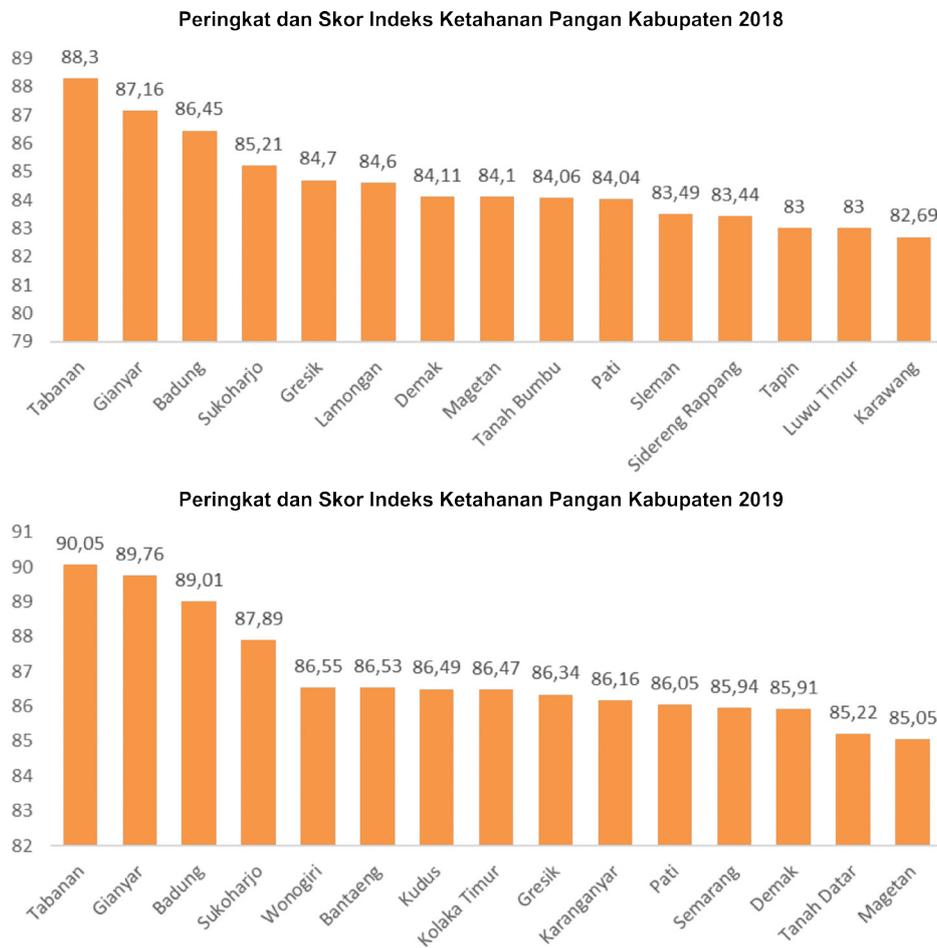
Secara nasional gambaran tentang Indeks Ketahanan Pangan (IKP) untuk kabupaten dan kota tahun 2019 dapat ditunjukkan pada gambar 4.

Gambar 4 tersebut menunjukkan terdapat 71 kabupaten atau sekitar 17,1% yang terdiri dari 416 kabupaten yang memiliki skor IKP yang cukup rendah dengan persebaran 25 kabupaten masuk Kelompok Satu (6%), 19 kabupaten (4,6%) yang masuk Kelompok Dua, dan terdapat 27 kabupaten (6,5) masuk ke Kelompok Tiga, sedangkan 25 kabupaten Kelompok Satu, sebanyak 1 kabupaten di Provinsi Maluku, 1 kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, 18 kabupaten berada di Provinsi Papua dan 5 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Sementara itu untuk wilayah kota terdapat 1 kota (1%) yang masuk ke dalam Kelompok Satu yaitu Kota Aceh, Kelompok Dua Kota Gunung Sitoli di Sumatra Utara, 3 kota masuk ke Kelompok Tiga Pagar Alam dan Lubuk Linggau Sumatra Selatan, Kota Tual Maluku (Badan Ketahanan Pangan, 2020).

Selanjutnya, pada tingkat provinsi, peringkat dan skor indeks ketahanan pangan (IKP) tahun 2019 ditunjukkan pada gambar 5.

Gambar 5 tersebut menunjukkan skor peningkatan angka ketahanan pangan provinsi

Gambar 3
Peringkat Dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 2018-2019

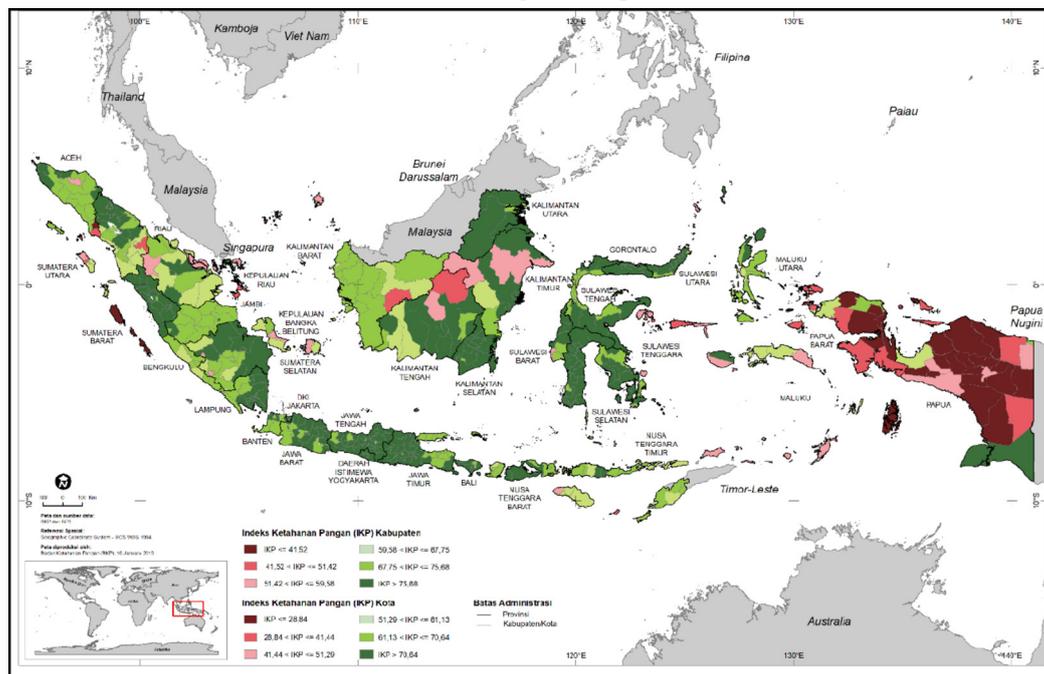


Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2018, 2020

di Indonesia, angka ketahanan tertinggi berada di Provinsi Bali karena dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik, skor Provinsi Bali 85,15 atas ketahanan pangan pada tahun 2019, pada umumnya selama ini penduduk setempat masih banyak yang memproduksi lahan pertanian, sehingga menjamin ketahanan pangan bagi penduduk daerah sekitar. Meskipun demikian, dalam perjalanannya Provinsi Bali tetap dihadapkan kepada permasalahan dalam menjaga ketahanan pangannya, yaitu masalah irigasi, dan resiko gagal panen yang cukup tinggi di provinsi tersebut (Gunjana, 2015).

Sedangkan gambar 5 tersebut juga menunjukkan angka ketahanan pangan terendah di Provinsi Papua yang hanya memiliki skor 25,13 pada tahun 2019, kesenjangan ketahanan pangan di Papua ini bisa terjadi karena perbandingan ketersediaan dan kebutuhan pangan mengalami defisit penyebabnya kebutuhan pangan lebih besar dibandingkan ketersediaan produksi pangan pokok, jika dilihat dari persentasenya Papua mengalami surplus dalam ketersediaan pangan tetapi distribusi di lapangan yang sering terkendala (Widati, 2015).

Gambar 4
Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2019



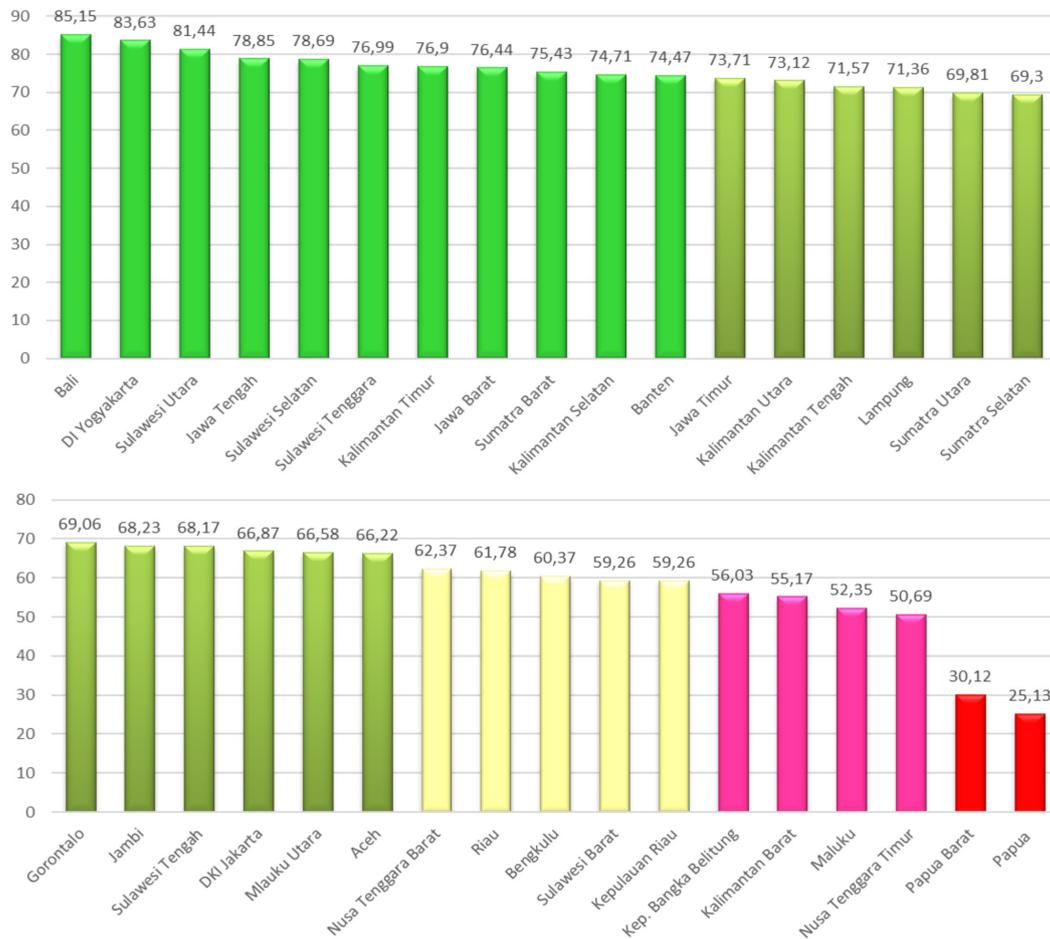
Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2020

Permasalahan diseminasi pangan di Indonesia masih sering terjadi, hal ini dikarenakan sejumlah wilayah memiliki kondisi tanah, serta infrastruktur yang berbeda, wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 3 wilayah Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah, sejumlah wilayah memiliki iklim yang baik untuk bercocok tanam dan didukung oleh kadar tanah yang subur (Bantacut, 2013). Namun di beberapa wilayah lainnya malah sebaliknya, pemerintah selalu dituntut agar menerapkan sifat yang profesional dan bekerja dengan cara yang kreatif serta inovatif. Hal tersebut sudah didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu terkait pemerintah daerah dan pada pasal 386 sampai 390 tentang dibutuhkannya sebuah inovasi dalam mendirikan pemerintahan dan memperkuat kinerja pemerintah (Wulandari, dkk., 2019). Beberapa bagian wilayah di Indonesia bisa

dikatakan sudah mulai berkembang karena semua akses sudah mudah didapatkan, sedangkan di bagian Indonesia Timur masih banyak ketimpangan infrastruktur dan ketahanan pangan akibat jarak yang sangat jauh sehingga dalam pemanfaatan lahan tidak maksimal, dan penduduk diharuskan bertahan dengan sumber pangan yang ada.

Menurut Bantacut (2013) daerah pedesaan merupakan penghasil kebanyakan dari hasil pertanian dan pangan, namun sayangnya desa masih tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan dan kegiatan ekonomi secara mandiri. Salah satu alasan utama kenapa hal ini terjadi adalah karena kondisi perekonomian pedesaan masih bergantung pada produksi dan pertukaran produk primer yang bernilai rendah dan dengan harga yang tidak stabil. Nilai terbesar yang terkandung dalam hasil pertanian diangkut dan dimanfaatkan di perkotaan. Kemudian daerah pedesaan menjadi daerah

Gambar 5
Peringkat Dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2019



Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2020

permintaan akan barang-barang manufaktur tersebut. Dari sudut pandang inilah kawasan pedesaan perlu dibangun untuk menjadi distributor pangan hasil karyanya yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan kegiatan ekonomi pada saat yang bersamaan. Untuk tujuan ini, melalui pengembangan kegiatan pengembangan nilai tambah, pangan dan perekonomian pedesaan harus bergantung pada produksinya sendiri melalui peningkatan usaha pembentukan nilai tambah. Nurhemi dkk (2014) mengungkapkan bahwa ketahanan pangan merupakan masalah yang menjadi perhatian semua negara mengingat pengaruhnya terhadap

perkembangan lingkungan makro ekonomi yang menguntungkan. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara terkait dengan ketersediaan pangan yang memadai, tetapi juga dengan akses ke infrastruktur.

Dalam pengalokasian anggaran tersebut terdapat beberapa capaian terkait pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di antaranya adalah jalan, jembatan, jalur kereta api, bandara baru, jaringan irigasi, perumahan KPR, dan rumah susun. Di dalam tabel 1 dapat dilihat capaian pembangunan infrastruktur 2015-2019 yang ada di Indonesia.

Kehadiran pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan penghubung dasar lainnya yang terus dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah mengupayakan ketahanan pangan dan infrastruktur saling berjalan dengan baik. Hal ini diwujudkan dengan terhitung dari tahun 2015-2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun sejumlah infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan yang mendorong perkembangan ekonomi di kawasan daerah pembangunan infrastruktur tersebut dan kawasan maju lainnya serta daerah yang berkembang untuk mengurangi disparitas sosial ekonomi wilayah (Cahyu, 2019). Salah satu provinsi di Indonesia yang mengadakan pembangunan infrastruktur yang cukup besar adalah Provinsi Bali, yang ditunjukkan dengan pembangunan bandara Bali Utara, jalan tol dan jalur kereta api di tahun 2019 (Nasution, 2017). Upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan pengalokasian anggaran kepada pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan keinginan untuk meningkatkan pemerataan antara daerah, meningkatkan kualitas serta mengurangi terjadinya ketimpangan layanan publik antar daerah, dan mendukung upaya pengentas kemiskinan (Kementerian Keuangan RI, 2020)

Apabila dilihat dari segi belanja pemerintah saat ini infrastruktur menjadi tujuan utama dari jalannya pemerintahan saat ini. Pemerintah saat ini selain membangun infrastruktur dari segi transportasi dan logistik, pemerintah juga harus memperhatikan dari segi yang lainnya contohnya pertanian (Islamiah, 2015). Ketahanan pangan diharapkan dapat menyeimbangkan perkembangan pembangunan pada masa yang akan datang, sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur pengelolaan air bagi pertanian dengan memastikan dukungan pendanaan (Kristiadi, 2017). Salah satu dampak dan tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masih sering terjadi disparasi antara wilayah terutama untuk wilayah timur dan wilayah barat sehingga perlu adanya integrasi dengan konsep pendekatan antar wilayah (Satya, 2015). Salah satu anacaman ketahanan pangan yang sangat berdampak yaitu alih fungsi lahan seperti pada beririgasi bergeser menjadi ke non padi, perumahan, industri, dan perkebunan (Saragih, 2015).

Dalam konteks wilayah provinsi dapat ditunjukkan data Indeks Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan, dan Ketahanan Pangan, sebagaimana pada gambar 6.

Data Indeks di dalam gambar 6 tersebut menunjukkan ketersediaan, keterjangkauan,

Tabel 1
Capaian Pembangunan Infrastruktur 2015-2019

No	Pembangunan Infrastruktur	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jalan (km)	5.299,0	2.528,7	2.754,2	2.271,3	2.007,0
2	Jembatan (m)	29.176	18.352	19.875	52.449	27.067
3	Rel Kereta Api (km'sp)	176,25	68,99	269,98	615,05	415,20
4	Bandara Baru (lokasi)	2	2	3	4	4
5	Jalan Tol PT Utama Karya (km)	-	-	199	405	253
6	Bendungan (unit)	29	32	36	48	48
7	Jaringan Irigasi (ribu ha)	647,3	343,7	329,4	194,7	162,0
8	Perumahan KPR (ribu unit)	-	58,4	23,7	50,0	84,0
9	Rusun (unit)	10.497	7.740	13.251	13.405	7.512

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2020

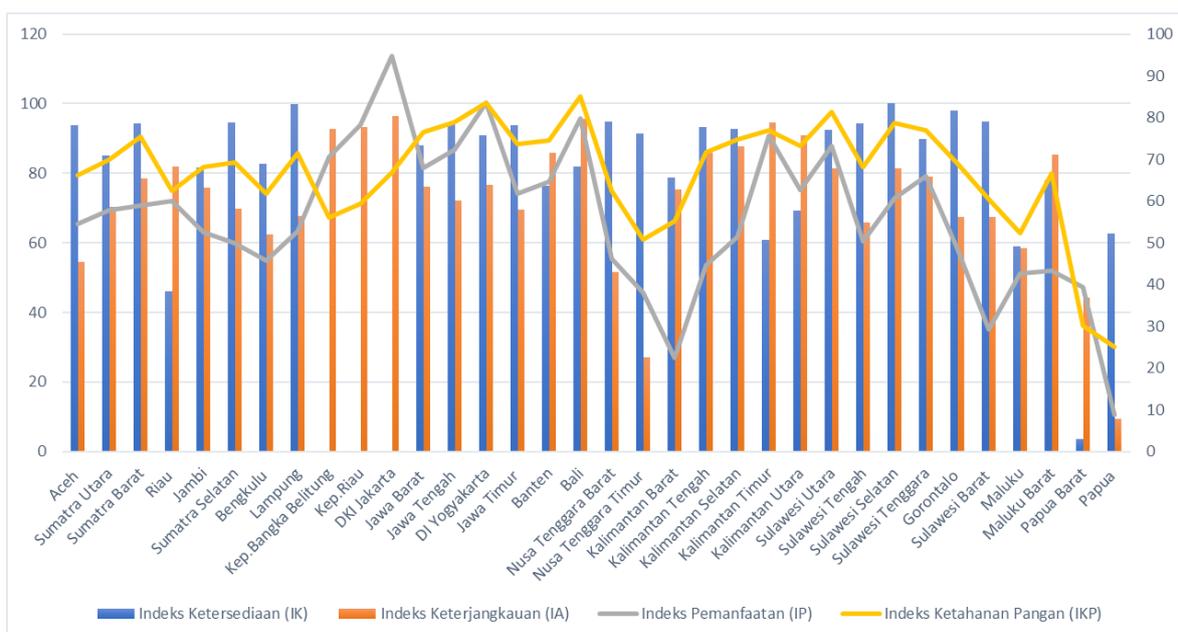
pemanfaatan dan ketahanan pangan wilayah provinsi. Hal ini jika kita melihat posisi wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang menggambarkan luasnya area wilayah Indonesia yang terbagi menjadi 34 Provinsi. Dari 34 Provinsi tersebut ketersediaan pangan masing-masing wilayah memiliki perbedaan, ada wilayah yang memiliki ketersediaan pangan yang melimpah dengan keterjangkauan yang kurang, di sisi lain ada daerah-daerah beberapa provinsi di timur Indonesia yang pemanfaatan, ketersediaan, dan keterjangkauannya minim, sehingga kemudian berdampak kepada daya ketahanan pangan daerah tersebut.

Provinsi Bali memiliki indeks keterjangkauan, pemanfaatan dan ketahanan pangan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari kurva pada gambar 6 yang menunjukkan skoring indeks yang hampir sama rata tinggi. Dalam indeks ketersediaan pangan Provinsi Bali

memiliki skor 81,92; sementara dalam indeks keterjangkauan 95,51; indeks pemanfaatan 79,80; dan indeks ketahanan pangan di 85,15. Jika diperbandingkan dengan provinsi lainnya skoring indeks Provinsi Bali tersebut lebih merata tingkat pencapaiannya sehingga Bali menjadi provinsi tertinggi dalam peringkat dan skor indeks ketahanan pangan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 5.

Keterjangkauan pangan suatu daerah ditunjukkan dengan hadirnya ketersediaan infrastruktur wilayah tersebut, semakin baik ketersediaan infrastruktur maka akan semakin tinggi keterjangkauan masyarakat terhadap sumber pangan dan pemanfaatan pangan yang ada (Kristiadi, 2017). Strategi ketersediaan dan pemerataan ketahanan juga diperlukan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan indeks ketersediaan dan ketahanan pangan di wilayahnya. Menurut Usmalıadanti (2011) strategi ketersediaan dan pemerataan ketahanan tersebut ada tujuh, sebagai berikut.

Gambar 6
Data Indeks Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan Dan Ketahanan Pangan Wilayah Provinsi.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2020.

Pertama, dengan membangun persediaan makanan domestik dan memanfaatkan sumber daya domestik secara optimal, meningkatkan cadangan pokok baik di pusat dan daerah serta dukungan masyarakat yang kuat.

Kedua, meningkatkan infrastruktur yang baik antar daerah sehingga memudahkan memasok pangan khususnya untuk wilayah Indonesia timur.

Ketiga, meningkatkan daya teknologi pada petani, atau pemerataan teknologi di setiap daerah dengan memberikan penyuluhan kepada petani, nelayan dan buruh.

Keempat, memfasilitasi dengan memperkuat pemasaran pangan yang efisien dan mengembangkan pasar yang berada di desa.

Kelima, menjaga kestabilan harga pokok pangan melalui pemasukan pangan pokok daerah dan pusat, dapat menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang terisolir

Keenam, memperbaiki gizi masyarakat melalui pangan dengan melakukan pengayaan dan memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat.

Ketujuh, menciptakan jaminan mutu makanan yang diperdagangkan oleh masyarakat dengan memperhatikan kualitas higienis, mutu yang berkualitas dan bergizi

Solusi pemerintah melalui program Nawacita dengan memprioritaskan kebijakan pembangunan untuk terus mendukung ketahanan pangan, dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan distribusi melalui pengadaan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh negara dan dilaksanakan dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua Barat (Kristiadi, 2017). Begitu halnya dengan yang terjadi di Provinsi Bali, keseriusan pemerintah daerah dan pemerintah

pusat dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di bidang infrastruktur menjadikan wilayah Bali dapat terhubung dengan baik dan memiliki tingkat distribusi serta keterjangkauan pangan yang baik (Gunjana, 2015; Nasution, 2017; Nugroho, 2020).

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang tidak bisa lepas dalam menunjang terwujudnya ketahanan pangan suatu wilayah. Provinsi Bali dalam hal ini menjadi salah satu provinsi yang memiliki skor indeks ketahanan pangan yang tinggi, bahkan dalam ranking indeks ketahanan pangan nasional Provinsi Bali memiliki skor indeks 85,15 menjadikan Provinsi Bali sebagai urutan pertama dalam ketahanan pangan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Kondisi ketahanan pangan kabupaten/kota di Provinsi Bali juga menunjukkan skor indeks yang tinggi, hal ini dapat dilihat dalam 2 tahun terakhir dimana posisi Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung menjadi kota dan kabupaten yang menduduki posisi teratas dalam skor indeks ketahanan pangan nasional.

Kedua, capaian pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di Provinsi Bali menjadi salah satu alasan utama kenapa Provinsi Bali dapat meningkatkan ketahanan pangannya. Selain dibarengi budaya agraria masyarakat yang masih tinggi, ketersediaan dalam infrastruktur penunjang juga pada akhirnya dapat memaksimalkan indeks keterjangkauan, ketersediaan, pemanfaatan dan ketahanan pangan yang ada di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F., Mulyo, J. H., Masyhuri, dan Subejo, S., 2019, Ketahanan Pangan Rumah Tangga Peternak Sapi Potong Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), hh. 151–177.
- Afiat, M. N., 2015), Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Di Propinsi Sulawesi Tenggara 1). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(8), hh. 20–26.
- Afriyenis, W., 2016, Perspektif Ekonomi Islam terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekoomi Islam*, 1(1), hh. 1–16.
- Agustina, R., 2020, *Infrastruktur Perkotaan Untuk Mendukung Kota Pintar Berkelanjutan*. <[http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/36438/mod_resource/content/1/20180224-01-Infrastruktur Perkotaan untuk Mendukung Kota Pintar Berkelanjutan.pdf](http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/36438/mod_resource/content/1/20180224-01-Infrastruktur_Perkotaan_untuk_Mendukung_Kota_Pintar_Berkelanjutan.pdf)>
- Arlis, A., Sudargo, T., dan Subejo, S., 2017, Hubungan Ketahanan Pangan Keluarga Dengan Status Gizi Balita (Studi Di Desa Palasari Dan Puskesmas Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), h. 359.
- Asahdi, A., 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), hh. 65–73.
- Badan Ketahanan Pangan, 2017, *Statistik Ketahanan Pangan 2017*. hh. 1–113.
- Badan Ketahanan Pangan, 2018, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018. *Kementrian Pertanian RI, II*, hh. 1–36.
- Badan Ketahanan Pangan, 2020, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019 (Food Security Index of Indonesia 2019). *Food Security Bureau, Republic of Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2020, *Statistik Daerah Kota Denpasar 2020*. In Badan Pusat Statistik Denpasar. <<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>>.
- Bantacut, T., 2013, Pembangunan Ketahanan Ekonomi dan Pangan Perdesaan Mandiri Berbasis Nilai Tambah. *Jurnal Pangan*, 22(2), hh. 397–406.
- Cahyu, 2019, Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur oleh Kementrian PUPR. *Www.Liputan6.Com*.
- Conceição, P., Levine, S., Lipton, M., dan Warren-Rodríguez, A., 2016, Toward a food secure future: Ensuring food security for sustainable human development in Sub-Saharan Africa. *Food Policy*, 60, hh. 1–9.
- Ervianto, W. I., 2017, Tantangan Pembangunan Infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. *Simposium II UNIID 2017*, 2(1), hh. 98–103.
- Erwandari, N., 2017, Implementasi Sustainable Development Goals (SDG's) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), hh. 875–888.
- Fagi, A. M., 2014, Ketahanan Pangan Indonesia Dalam Ancaman : Strategi dan Kebijakan Pemantapan dan Pengembangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), hh. 11–25.

- Fukuda-Parr, S., 2016, From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development. *Gender and Development*, 24(1), hh. 43–52.
- Gunjana, G., 2015, Bali Hadapi Tantangan Jaga Ketahanan Pangan. *Www.Investor.Id*.
- Hapsari, N. I., dan Rudiarto, I., 2017, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan dan Ketahanan Pangan dan Implikasi Kebijakannya di Kabupaten Rembang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 5(2), hh. 125–140.
- Husna, N., dan Albsayah, R., 2012, Dampak Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Reklamasi Pantai Tapaktuan Aceh Selatan. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 1(2), hh. 171–178.
- Islamiah, N., 2015, Analisis Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Economix*, 3(1), hh. 46–57.
- Janti, G. I., 2016, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), hh. 1–21.
- Jenderal, I., Ri, K. P., Kependudukan, S., Mada, U. G., Mada, U. G., Pascasarjanaprodi, S., Pembangunan, K., dan Mada, U. G., 2019, *Ketahanan Pangan Rumah Tangga Peternak Sapi Potong Rakyat Pada Empat Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta*. 25(2), hh. 151–177.
- Kementrian Keuangan RI., 2020, RAPBN 2019 APBN Untuk Mendorong Inves dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Www.Kemenkeu.Go.Id*.
- Kristiadi, 2017, Pembangunan Infrastruktur Untuk Ketahanan Pangan Diperlukan. *Www.Mediaindonesia.Com*.
- Moleong, L. J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. In PT. Remaja Rosda Karya. <<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>>.
- Muller, M., Biswas, A., Martin-Hurtado, R., dan Tortajada, C., 2015, Built infrastructure is essential. *Science*, 349(6248), hh. 585–586.
- N, K. G. S., Oktavia, I., dan Chandra, Y.A., 2018, Pro Kontra Hutang Dan Pembangunan Infrastruktur Indonesia. *Sinergitas Quadruple Helix: E-Business Dan Fintech Sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal*, 1, hh. 423–433.
- Nasution, A.D., 2017, Bali Ajukan Pembangunan Enam Infrastruktur Baru. *Www.Katadata.Co.Id*.
- Nazir, M., 1999, *Metode Penelitian (IV)*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, M.B., 2020, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), hh. 1689–1699.
- Nurhemi, Soekro, S. R. I., dan R., G. S., 2014, Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan. *Bank Indonesia, WP/4*, hh. 1–70.
- Pramono, S.A.D., 2014, Pengaruh Modal Sosial terhadap Kemiskinan Rumah Tangga. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 7(2), hh. 109–120.
- Pratama, N.B., dan Purnomo, E. P., 2020, *Sustainable Development Goals (*

- SDGs*) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Info artikel. 6(2), hh. 64–74.
- Putro, S.Y.E., 2015, *Efektivitas Penggunaan Pinjaman LuarNegeri untuk PembangunanInfrastruktur dalamPenyusunanAPBN 2014 dan APBN 2015*. hh. 28–48.
- Rachman, H.P.S., 2016, Aksesibilitas pangan: faktor kunci pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. *Jurnal Pangan*, 19(2), hh. 147–156.
- Rivani, E., 2012, Determination of the Dimensions and Indicators of Food Security in Indonesia: the National Food Security Board-World Food Program Methodology Revisited. *Widyariset*, 15(1), hh. 151–162.
- Santoso, A.B., 2016, Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Maluku. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 35(1), h. 29.
- Saragih, J.P., 2015, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), hh. 45–59.
- Satya, V.E., 2015, Manajemen Utang Pemerintah Dan Permasalahannya State Debt Management Analysis : *Kajian*, Vol. 20 No. 1 Maret 2015, hh. 59–74.
- Schaar, R.M.A. van der., 2017, *Penduduk Indonesia*. <<https://www.indonesia-investments.com>>
- Soekirman, S., 2000, Ilmu Gizi dan Aplikasinya Untuk Keluarga dan Masyarakat. In *Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional*.
- Sukwika, T., 2018, Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), h. 115.
- Suryana, A., 2014, Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025 : Tantangan dan Penanganannya Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025 : Challenges and Its Responses. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), hh. 123–135.
- Usmaliadanti, C., 2011, Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009. In *Journal of Economics Undip Repository* (Vol. 2, Issue 1).
- Wado, L.A.L., Sudargo, T., dan Armawi, A., 2019, Sosio Demografi Ketahanan Pangan Keluarga Dalam Hubungannya Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 1 – 5 Tahun (Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bandarharjo Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), hh. 178–203.
- Wati, R. I., Raya, A. B., Widiastuti, A., Rohmah, F., dan Utami, D., 2019, Potensi Wanita Dalam Mendukung Pemasaran Biji Kakao Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Studi Di Dusun Nglengkong, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), hh. 253–276.
- Widati, A.W., 2015, *Ketersediaan pangan di provinsi papua barat*. <[https://media.neliti.com/media/publications/171501-ID-Ketersediaan-](https://media.neliti.com/media/publications/171501-ID-Ketersediaan-pangan-di-provinsi-papua-barat)

- Pangan-Di-Provinsi-Papua-Ba.Pdf, 10, 978–979>.
- Wulandari, W., Suranto, dan Priyo Purnomo, E., 2019, Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), hh. 13–28.
- Yeoh, J. S. W., Le, Q., Terry, D. R., dan McManamey, R., 2014, Challenges of Food Security for Migrants Living in a Regional Area of Australia : Food Availability , Accessibility and Affordability. *Journal of Food Security*, 2(3), hh. 72–78.
- Yogyakarta, B.P.P.D.I., 2019, *Kajian pendahuluan penurunan kemiskinan dan ketimpangan*.